



**LAPORAN KEGIATAN BKSAP DPR RI MENJADI NARA SUMBER
DALAM**

**SEMINAR INTERNASIONAL : PROSES DAN TUJUAN DENGAN
TEMA**

***CONSOLIDATION DÉMOCRATIQUE ET D'ENRACINEMENT DE LA
BONNE GOUVERNANCE***

TANGGAL 10-11 JUNI 2013, ALGIERS - ALJAZAIR

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pengiriman Delegasi

Dasar pengiriman Delegasi DPR RI ke Seminar Internasional di Aljazair : Proses dan Tujuan dengan tema "*Consolidation Democratique et d'enracinement de la bonne gouvernance*" yang diselenggarakan pada tanggal 10 – 11 Juni 2013 adalah sebagai berikut :

1. Surat Undangan atas nama Ketua Parlemen (*People's National Assembly*) Aljazair yaitu dari Dr. Fatiha Aouissat, Wakil Ketua Parlemen Aljazair bidang Legislasi kepada Pimpinan DPR-RI.
2. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 76/PIMP/IV/2012-2013 tanggal 4 Juni

2013 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghadiri Seminar Internasional di Aljazair : Proses dan Tujuan dengan tema "*Consolidation Democratique et d'enracinement de la bonne gouvernance*", tanggal 8 – 13 Juni 2013.

3. Hasil keputusan Rapat Pimpinan (Rapim) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 30 Mei 2013 perihal menyetujui untuk menghadiri undangan dimaksud.

B.Susunan Delegasi

Sesuai Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 76/PIMP/IV/2012-2013, Delegasi DPR RI yang ditunjuk yaitu :

- Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A. (Ketua BKSAP/F-PKS/A-75 Komisi X).

C.Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Maksud dan tujuan dari pengiriman Delegasi DPR RI ke Aljazair adalah untuk memenuhi undangan Parlemen Aljazair sebagai narasumber untuk proses berbagi pengalaman dan bertukar pikiran terkait reformasi yang dilakukan Aljazair terutama setelah Aljazair akan melakukan proses perubahan konstitusi.

D. Misi Delegasi

Misi dari pengiriman Delegasi DPR RI untuk berbagi pengalaman (*sharing*) dan diskusi mengenai pengalaman reformasi yang dialami oleh Indonesia kepada Parlemen Aljazair sebagai Tuan Rumah Seminar dan peserta undangan lainnya serta diskusi mengenai kuota perempuan dalam politik, Pemilihan Umum serta kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM).

E. Persiapan Pelaksanaan Tugas/Kunjungan

Sebelum keberangkatan, Delegasi DPR RI melakukan persiapan administrasi, teknis, dan substansi. Persiapan administrasi berupa surat menyurat dan koordinasi dengan pihak Panitia penyelenggara, KBRI di Aljazair, penerbitan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Surat Perintah Perjalanan Dinas, pembuatan Surat Tugas dan lain-lain. Persiapan-persiapan teknis antara lain berupa penyusunan jadwal perjalanan/penerbangan dan pemesanan akomodasi untuk Delegasi, koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait seperti dengan KBRI atau Kementerian Luar Negeri RI. Persiapan substansi yaitu berupa penyiapan bahan presentasi dan permintaan bahan masukan kepada instansi terkait.

II. ISI LAPORAN

A. Uraian tentang situasi umum Seminar

Kegiatan Seminar Internasional Aljazair: Proses dan Tujuan diselenggarakan di *National Armed Forces Circle*, Beni Messous – Algiers, Aljazair pada tanggal 10-11 Juni 2013. Delegasi DPR RI, Dr. KH Surahman Hidayat, M.A. memenuhi undangan sebagai salah satu narasumber dalam Seminar Internasional yang melibatkan politisi, akademisi, dan masyarakat sipil Aljazair tersebut. Selain Delegasi DPR RI, hadir pula beberapa tamu undangan anggota Parlemen dari negara-negara sahabat dan kawasan Mediterania seperti Parlemen Republik Malta, *Grand National Assembly of Turkey*, dan juga Parlemen Iran. Sejumlah narasumber lainnya adalah akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Aljazair dan juga perwakilan dari *Inter-Parliamentary Union* (IPU).

Acara dimulai sekitar pukul 10.00 waktu setempat dengan moderator Dr. Fatiha Aouissat, Wakil Ketua Parlemen *People's National Assembly* Aljazair. Dalam pengantarnya, moderator menyampaikan bahwa forum ini digelar untuk proses bertukar pikiran terkait reformasi yang akan dilakukan Aljazair terutama setelah Aljazair berencana melakukan proses perubahan konstitusi.

Selanjutnya, Ketua *People's National Assembly* Aljazair, Dr. Mohamed Larbi Ould Khelifa menyampaikan sambutannya yang menggarisbawahi tujuan seminar untuk menyerap pengalaman

lainnya yang ada di kawasan sekitar mengenai reformasi politik. Khelifa juga menyampaikan bahwa Republik Aljazair terbentuk atas hasil perjuangan revolusi rakyat melawan penjajahan lebih dari 130 tahun lalu. Republik Aljazair sejak berdirinya, dengan perjuangan dan korban jiwa yang mencapai 1,5 juta jiwa rakyat, Aljazair disebut sebagai negara Demokrasi Rakyat (*People's Democracy*). Namun dia mengungkapkan bahwa referensi demokrasi tersebut bukan berasal dari demokrasi yang ada di Eropa atau lainnya. Proses reformasi politik di Aljazair juga kembali dimulai ketika sejak 2011 lalu, Presiden Aljazair, H.E. Abdellaziz Bouteflika, menyampaikan sejumlah rencana reformasi politik, dan kemudian disusun melalui proposal *National Reconciliation*. Aljazair juga memaparkan mengenai kondisi perpolitikan saat ini yang melibatkan 27 partai politik, partisipasi perempuan dalam politik juga meningkat hingga saat ini mencapai 30%, bahkan 3 orang Wakil Ketua di Parlemen adalah perempuan. Dia juga menyampaikan sejak tahun 1989 proses politik di Aljazair berkembang menjadi era multipartai. Namun, kebebasan yang tak terkontrol tersebut digunakan untuk menyimpangkan pandangan ideologi menggunakan kekerasan. Saat ini, melalui seminar ini, Aljazair berkeinginan pula untuk menghimpun pandangan dan pengalaman berbagai negara dalam proses reformasi politik dan perkembangan *good governance*, hak-hak warga negara dan manusia, kebebasan berbicara dan keadilan sosial dan lain sebagainya.

B. Agenda seminar yang dibahas

Agenda Seminar Internasional tersebut diantaranya mengenai pengalaman reformasi di negara-negara sahabat Aljazair termasuk Indonesia; diskusi mengenai kuota perempuan dalam politik dan Pemilu, serta diskusi mengenai kebebasan HAM.

C. Partisipasi Delegasi DPR RI

Delegasi DPR-RI (Ketua BKSAP) berpartisipasi aktif dalam seminar internasional tersebut dengan menyampaikan bahan dan pengalaman mengenai transisi politik di Indonesia, terutama pada era tahun 1997-1998 yang membawa perubahan signifikan dalam proses ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Delegasi DPR RI mendapatkan kesempatan berbicara sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A., memaparkan perkembangan transisi politik yang ada di Indonesia. Dalam paparannya, Ketua BKSAP mengungkapkan bahwa sejak berdirinya, Indonesia telah mengalami beberapa kali transisi politik, mulai dari perubahan bentuk Negara (dari Republik ke Serikat dan kembali lagi ke Republik), penggantian konstitusi (UUD 1945, ke UUD Serikat, kemudian ke UUD 1950 hingga kembali lagi ke UUD 1945 dan kemudian diamandemen). Semua itu merupakan bagian dari proses perubahan yang mengikuti suasana kebatinan bangsa.

Transisi paling signifikan terjadi pada 1998, ketika krisis ekonomi, Indonesia harus memulai perubahan sistem politik dari Orde Baru. Tuntutan masyarakat, mahasiswa direspon melalui sejumlah hal termasuk amandemen konstitusi. Proses yang

dilakukan hanyalah melalui amandemen konstitusi UUD 1945, tidak melalui penggantian UUD. Hal ini dilakukan dengan alasan spesifik yakni menghindari beban sosial politik yang tinggi, mengingat negara saat itu dalam keadaan rapuh baik ekonomi, sosial politik. Ada pula beberapa kesepakatan lain untuk tidak mengubah preambule (pembukaan) UUD 1945, dan hanya mengubah isi batang tubuh serta penjelasannya.

Dalam konteks perubahan/amandemen konstitusi tersebut. Indonesia menempatkan proses perubahan dalam kaca mata gradual. Tidak langsung sekaligus. Pertimbangan utama amandemen konstitusi dilakukan melalui beberapa tahapan adalah karena Indonesia ingin bertransformasi dengan segera, sehingga, pasal-pasal yang disetujui dalam masing-masing kurun waktu tertentu dan diajukan, disetujui oleh MPR-RI adalah pasal-pasal yang telah matang pengkajiannya serta ringan dalam memicu perdebatan publik. Ada pula garis tegas pasal yang tidak bisa diubah. Dan hal tersebut menjadi kesepakatan bangsa, yakni mengenai bentuk negara yang harus tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan demokrasi di Indonesia adalah diantaranya mengenai bagaimana perlunya sebuah bangsa mengelola hak-hak kebebasan yang dimiliki menjadi sebuah bagian yang menyempurnakan perjalanan bangsa. Bukan menjadi bagian yang menambah masalah, maupun membuka *mindset* bahwa kebebasan yang dimiliki adalah absolut. Kebebasan perlu dikelola agar menjadi bagian dari hak yang dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Ketua BKSAP juga menjelaskan bahwa hubungan Indonesia-Aljazair terjalin erat sejak masa kolonial. Kedua bangsa, selain terikat secara historis juga memiliki hubungan sosiologis dalam kaitannya dengan aspek religi. Indonesia menyatakan akan siap selalu untuk saling mendukung dan membantu dalam proses bernegara dan hubungan bilateral kedua negara.

D. Hasil-hasil yang dicapai

- 1.** Proses transisi politik di Indonesia menjadi bagian dari *success story* yang dimiliki bangsa untuk dijadikan bagian *best practices* dalam transisi demokrasi di sejumlah negara lainnya.
- 2.** Seminar politik internasional di Aljazair dilakukan dalam rangka mencari dan menyerap berbagai pengalaman negara-negara lain dalam hal transisi politik. Selain itu, masukan, diskusi dan debat dari para akademisi, masyarakat sipil juga diselenggarakan dalam konteks akademis perubahan politik di negara tersebut.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Seminar Internasional di Parlemen Aljazair tanggal 10 – 11 Juni 2013 telah berjalan sesuai dengan rencana dan visi misi serta tujuan DPR RI mengirim delegasi untuk mengikuti seminar telah tercapai.
2. Seminar ini merupakan sarana penting untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan transisi politik dan demokrasi yang berlangsung di dunia serta berbagi pengalaman dan diskusi dalam mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan.
3. Indonesia telah menjadi *role model* yang sukses bagi negara-negara lain di dalam menjalankan transformasi demokrasi.

B. Saran

Success story reformasi Indonesia perlu lebih disosialisasikan ke negara-negara lain. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia saat ini dikenal dunia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang *compatible* dengan demokrasi, serta dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu 6,3 %.

IV. PENUTUP

A.Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Duta Besar LB & BP Republik Indonesia untuk Aljazair beserta jajarannya di KBRI Algiers atas segala bantuan dan dukungannya terhadap Delegasi DPR RI selama mengikuti Seminar Internasional ini sehingga misi Delegasi DPR RI dapat berjalan lancar dan tercapai seperti yang diharapkan.

B.Keterangan tentang lampiran

Lampiran mencakup undangan dari Tuan Rumah Parlemen Aljazair, Presentasi Delegasi DPR-RI dan bahan masukan dari instansi terkait.

C.Kata penutup

Demikian Laporan Delegasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2013

Ketua BKSAP,

TTD

Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.

A - 75